



**PENGARUH *NEGATIVE INFORMATION FRAMING*
TERHADAP *RELIGIOUS-POLITICAL TOLERANCE***

SKRIPSI

**diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi**

oleh

Ahmad Nur Rosikin

1511415080

**JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2019**



**PENGARUH *NEGATIVE INFORMATION FRAMING*
TERHADAP *RELIGIOUS-POLITICAL TOLERANCE***

SKRIPSI

**diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi**

oleh

Ahmad Nur Rosikin

1511415080

**JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan penulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 19 Februari 2019



Ahmad Nur Rosikin

NIM 1511415080

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh *Negative Information Framing* terhadap *Religious-Political Tolerance*” telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana Psikologi pada hari Rabu 6 Maret 2019.

Panitia Ujian Skripsi:



Ketua
Dra. Sinta Saraswati M.Pd.,Kons.

NIP. 196006051999032001

Penguji I

Dr. Drs. Edy Purwanto M.Si.

NIP. 196301211987031001

Sekretaris

Sugiariyanti S.Psi., M.A.

NIP. 197804192003122001

Penguji II

Rulita Hendriyani S.Psi., M.Si.

NIP. 197202042000032001

Penguji III/Pembimbing

Nuke Martiarini S.Psi., M.A.

NIP. 198103272012122001

MOTTO DAN PERUNTUKAN

Motto

Sepira gedhening sangsoro yen tinompo amung dadi coba (Kakang R.M. Imam Koesoepangat).

Peruntukan

Bapak dan Ibu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi mengenai “Pengaruh *Negative Information Framing* terhadap *Religious-Political Tolerance*” dengan baik dan lancar.

Skripsi mengenai “Pengaruh *Negative Information Framing* terhadap *Religious-Political Tolerance*” ini dapat selesai dengan baik tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini secara langsung ataupun tidak langsung kepada:

1. Drs. Sugeng Hariyadi S.Psi. M.S., selaku Ketua Jurusan Psikologi yang memberikan inspirasi dan motivasi di setiap perkuliahan.
2. Binta Mu'tiya Rizki S.Psi., M.A., sebagai dosen wali saya.
3. Dr. Edy Purwanto M.Si., selaku penguji 1 yang telah memberikan masukan untuk penulisan skripsi.
4. Rulita Hendriyani S.Psi.,M.Si., selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan untuk penulisan skripsi.
5. Nuke Martiarini, S.Psi.,M.A., sebagai dosen pembimbing yang banyak memberikan masukan dan motivasi untuk peneliti.
6. Amri Hana Muhammad S.Psi.,M.A. dan Luthfi Fathan Dahriyanto S.Psi.,M.A., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan terkait konsep, alat ukur, serta modul penelitian.

7. Laeli, Fahmi, Febri, Sofi, dan Putri Amalia sebagai rekan diskusi yang memberikan masukan untuk modul penelitian.
8. Wahid dan Reny yang membantu mempersiapkan ujian.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian, baik subjek penelitian ataupun yang membagikan *link* uji coba instrumen.
10. Rekan-rekan sebimbangan yang saling memotivasi, saling memberi masukan, serta menunjukkan arti kebersamaan.

Kiranya setitik inspirasi dan motivasi dalam skripsi ini dapat meningkatkan semangat para pembaca untuk mengembangkan ilmu yang telah dimiliki. Terima kasih.

Penulis,

Ahmad Nur Rosikin

ABSTRAK

Rosikin, Ahmad Nur. 2019. Pengaruh *Negative Information Framing* terhadap *Religious-Political Tolerance*. Skripsi. Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Nuke Martiarini S.Psi., M.A.

Kata Kunci: *Religious-Political Tolerance, Negative Information Framing*

Religious-Political Tolerance merupakan kesediaan, penerimaan, serta dukungan terhadap hak politik orang dengan agama yang berbeda. Hak politik yang dimaksud meliputi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kehadiran media dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk mengarahkan pembaca/penonton agar tidak memilih calon pemimpin yang berbeda agama. Strategi tersebut dilakukan dengan membentuk *Negative Information Framing* yang membahas mengenai kekurangan dan kelemahan calon pemimpin yang berbeda agama. Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini diajukan untuk mengkaji pengaruh *Negative Information Framing* terhadap *Religious-Political Tolerance*.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen. Desain yang digunakan adalah desain *static group design*, yaitu desain yang menggunakan dua kelompok tanpa dilakukannya *pre-test* (Seniati d.k.k , 2011:109). Desain ini akan membagi subjek ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen sesuai kelas yang sudah ada (tidak dilakukan *random assignment*). Pada kelompok eksperimen (31 subjek) diberikan perlakuan *negative information framing*, sedangkan kelompok kontrol (31 subjek) tidak diberi perlakuan apa pun. Data diambil menggunakan skala *likert* dengan 21 aitem dengan koefisien reliabilitas sebesar 0.897.

Secara deskriptif, *religious-political tolerance* pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berada dalam kategori yang tinggi. Hasil *religious-political tolerance* pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan teknik *Mann-Whitney U-Test* menunjukkan taraf signifikansi 0.010 ($0.010 < 0.05$), maka disimpulkan ada pengaruh *negative information framing* terhadap *religious-political tolerance*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERUNTUKAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB	
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan	12
1.4 Manfaat	13
1.4.1 Manfaat Praktis	13
1.4.2 Manfaat Teoritis	14
2 LANDASAN TEORI	14
2.1 <i>Religious-Political Tolerance</i>	14
2.1.1 Pengertian <i>Religious-Political Tolerance</i>	14

2.1.2	Komponen <i>Religious-Political Tolerance</i>	16
2.1.3	Indikator <i>Religious-Political Tolerance</i>	17
2.1.4	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Religious-Political Tolerance</i>	19
2.2	<i>Negative Information Framing</i>	24
2.2.1	Pengertian <i>Negative Information Framing</i>	24
2.2.2	<i>Framing Package</i>	28
2.2.3	Efek <i>Negative Information Framing</i>	30
2.3	Pengetahuan Politik Terkait Pemilu.....	32
2.3.1	Pengertian Pengetahuan Politik Terkait Pemilu.....	32
2.3.2	Aspek Pengetahuan Politik Terkait Pemilu	33
2.4	Pengaruh <i>Religious-Political Tolerance</i> terhadap <i>Negative Information Framing</i>	34
2.5	Penelitian terdahulu.....	36
2.6	Hipotesis Penelitian.....	40
3	METODE PENELITIAN.....	41
3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Desain Penelitian.....	41
3.3	Variabel Penelitian	43
3.3.1	Identifikasi Variabel Penelitian.....	43
3.3.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	44
3.3.3	Pengaruh Antar Variabel Penelitian.....	45
3.4	Subjek Penelitian.....	45
3.5	Metode dan Alat Pengumpul Data	46

3.5.1 Skala <i>Religious-Political Tolerance</i>	46
3.5.2 Tes Pengetahuan Politik Terkait Pemilu	47
3.5.3 <i>Negative Information Framing</i>	47
3.6 Validitas dan Reliabilitas	49
3.6.1 Validitas	49
3.6.2 Reliabilitas	49
3.7 Uji Coba Instrumen	50
3.8 Metode Analisis Data	50
4 HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Persiapan Penelitian	52
4.1.1 Orientasi Kancah Penelitian	52
4.1.2 Penyusunan Instrumen Penelitian	52
4.1.3 Penyusunan Modul Perlakuan	53
4.2 Uji Coba	53
4.2.1 Uji Coba Instrumen	53
4.2.2 Modul Perlakuan	56
4.2.3 Validitas Internal Eksperimen	60
4.3 Pelaksanaan Penelitian	61
4.3.1 Pengambilan Data	61
4.3.2 Pelaksanaan Skoring	61
4.3.3 Cek Manipulasi	62
4.4 Hasil Penelitian	63
4.4.1 Analisis Deskriptif Hasil Penelitian	63

4.4.2 Uji Hipotesis	82
4.5 Pembahasan.....	87
4.6 Keterbatasan Penelitian.....	93
5 PENUTUP.....	94
5.1 Simpulan	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabulasi Hasil Studi Pendahuluan	6
1.2 Alasan Memilih dan Tidak Memilih Calon Pemimpin yang Berbeda Agama	7
3.1 <i>Blue Print</i> Skala <i>Religious-Political Tolerance</i>	46
3.2 <i>Blue Print</i> Pengetahuan Politik Terkait Pemilu	47
3.3 <i>Framing Package</i>	48
4.1 Hasil Uji Coba Skala <i>Religion-Political Tolerance</i>	54
4.2 Reliabilitas Alpha Skala <i>Religion-Political Tolerance</i>	55
4.3 <i>Blue Print</i> Tes Pengetahuan Terkait Pemilu	55
4.4 Reliabilitas Alpha Tes Pengetahuan Politik terkait Pemilu	55
4.5 <i>Expert Judgement</i>	56
4.6 Validitas Isi Perlakuan 1	57
4.7 Validitas Isi Perlakuan 2	57
4.8 Validitas Isi Perlakuan 3	58
4.9 Masukan Penelitian	59
4.10 Cek Manipulasi	62
4.11 Statistik Deskriptif <i>Religious-Political Tolerance</i>	64
4.12 Kategori <i>Religious-Political Tolerance</i>	65
4.13 Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> pada Kelompok Eksperimen ..	65
4.14 Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> pada Kelompok Kontrol.....	66
4.15 Statistik Deskriptif Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i>	

Berdasarkan Indikator Mengizinkan Berbicara di Hadapan Publik	67
4.16 Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Berbicara di Hadapan Publik pada Kelompok Eksperimen.....	68
4.17 Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Berbicara di Hadapan Publik pada Kelompok Kontrol ...	68
4.18 Statistik Deskriptif <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Menjabat di Kantor Pemerintahan.....	69
4.19 Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Menjabat Di Kantor Pemerintahan pada Kelompok Eksperimen	70
4.20 Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Menjabat di Kantor Pemerintahan pada Kelompok Kontrol	71
4.21 Statistik Deskriptif <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Demonstrasi/Kegiatan di Ruang Publik	72
4.22 Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Demonstrasi/Kegiatan di Ruang Publik pada Kelompok Eksperimen.....	73
4.23 Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Demonstrasi/Kegiatan di Ruang Publik pada Kelompok Kontrol	73

4.24	Statistik Deskriptif <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Agar Telepon Pribadi Tidak Perlu Disadap ...	74
4.25	Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Agar Telepon Pribadi Tidak Perlu Disadap pada Kelompok Eksperimen.....	75
4.26	Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Agar Telepon Pribadi Tidak Perlu Disadap pada Kelompok Kontrol	76
4.27	Statistik Deskriptif <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Perlindungan yang Sama di Hadapan Hukum.....	77
4.28	Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Perlindungan yang Sama di Hadapan Hukum pada Kelompok Eksperimen.....	78
4.29	Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Perlindungan yang Sama di Hadapan Hukum pada Kelompok Kontrol	78
4.30	Statistik Deskriptif <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Memberikan Materi di Sekolah.....	79
4.31	Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Memberikan Materi di Sekolah pada Kelompok Eksperimen.....	80

4.32	Gambaran <i>Religious-Political Tolerance</i> Berdasarkan Indikator Mengizinkan Memberikan Materi di Sekolah pada Kelompok Kontrol	81
4.33	Ringkasan Deskriptif <i>Religious-Political Tolerance</i>	82
4.34	<i>Ranks Mann-Whitney</i>	82
4.35	Hasil Uji Hipotesis	83
4.36	Statistik Deskriptif Pengetahuan Politik Terkait Pemilu Kelompok Eksperimen.....	83
4.37	Uji Beda <i>Religious-Political Tolerance</i> Kelompok Eksperimen Ditinjau dari Level Pengetahuan Politik Terkait Pemilu	84
4.38	Statistik Deskriptif Pengetahuan Politik Terkait Pemilu Kelompok Kontrol	85
4.39	Uji Beda <i>Religious-Political Tolerance</i> Kelompok Kontrol Ditinjau dari Level Pengetahuan Politik Terkait Pemilu	85
4.40	Uji Beda Pengetahuan Politik Terkait Pemilu pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir Pengaruh <i>Negative Information Framing</i> terhadap <i>Religious-Political Tolerance</i>	36
3.1 Desain Eksperimen.....	42
3.2 Pengaruh Antar Variabel.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Modul Eksperimen dan Instrumen	104
2 Uji Validitas <i>Religious-Political Tolerance</i>	124
3 Uji Validitas Tes Pengetahuan Politik Terkait Pemilu	126
4 Validitas Isi Skala <i>Religious-Political Tolerance</i>	128
5 Validitas Isi Tes Pengetahuan Politik Terkait Pemilu.....	129
6 Tabulasi <i>Try Out</i> dan Data Penelitian	130

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan bahwa intoleransi politik di Indonesia meningkat selama tiga tahun terakhir (www.republika.co.id, diakses pada 4 November 2018). LSI melaporkan data bahwa lebih dari 50% responden keberatan jika seorang non muslim menjabat sebagai bupati/walikota, gubernur, wakil presiden atau presiden. Di sisi lain, lebih dari 75% responden non muslim menyatakan tidak keberatan jika seorang muslim menjadi bupati/walikota, gubernur, wakil presiden atau presiden.

Rendahnya tingkat *religious-political tolerance* di Indonesia bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satu di antaranya adalah kondisi bangsa Indonesia yang multikultural. Artinya, terdapat beraneka ragam kelompok dengan identitas masing-masing. Banyaknya perbedaan tersebut membuat masyarakat rentan terhadap konflik, terutama konflik antar kelompok. Konflik tersebut diawali dengan adanya kategorisasi *in group* dan *outgroup*. Selanjutnya, etnosentrisme yang meyakini baiknya budaya sendiri (*in group*) dan meremehkan budaya lain (*out group*) akan memungkinkan konflik yang lebih besar dan kompleks.

Menjadi memprihatinkan ketika identitas kelompok sengaja digunakan untuk keperluan politik praktis. Salah satunya adalah penggunaan isu-isu agama. Penggunaan isu tersebut menguat ketika memasuki masa-masa transisi

kepemimpinan baik di pemerintah daerah maupun pusat. Bukti yang relevan terkait hal tersebut adalah *trend* pelaporan tokoh politik dengan dugaan penistaan agama.

Isu penistaan agama yang terjadi akhir-akhir ini tidak bisa dilepaskan dari permainan politik. Posisi pihak terlapor dugaan penistaan agama akan dimanfaatkan oleh lawan politik untuk merendahkan citra politiknya. Beberapa kasus terkait dengan penistaan agama yang melibatkan tokoh politik adalah kasus BTP saat Pilkada DKI, pembacaan puisi oleh SSP, serta GP saat membacakan puisi di debat calon gubernur Jawa Tengah. Kasus pertama adalah tuntutan kelompok muslim agar BTP dihukum atas tuduhan penistaan agama dalam pidatonya (nasional.republika.co.id, diunduh 16 April 2018).

Masih terkait dengan kasus yang menjerat BTP, pada Maret 2017 lalu juga muncul kasus penolakan untuk mensholatkan Jenazah memilih BTP di Pilkada DKI putaran pertama. Sebagaimana yang dilansir dalam liputan6.com, jenazah seorang nenek ditelantarkan oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut terjadi karena sang nenek memilih pasangan BTP dan DSH saat Pilkada DKI putaran pertama (www.liputan6.com, diunduh 24 April 2018). Kasus seperti ini bukan lagi hanya isu mengenai agama atau toleransi antar umat beragama, melainkan telah berkenaan dengan isu toleransi politik. Pasalnya, kasus ini berkaitan dengan hak-hak politik warga negara yang harus dijamin. BTP memiliki hak dipilih dalam Pilkada dan masyarakat memiliki hak memilih secara bebas. Oleh karena itu, adanya sentimen-sentimen anti-BTP yang kemudian berimbas pada sentimen negatif bagi para pendukungnya merupakan indikasi rendahnya toleransi politik.

Baru-baru ini, pelaporan dugaan penistaan agama melibatkan calon gubernur GP. Puisi yang dibacakan GP saat debat calon gubernur Jawa Tengah dianggap sebagai penistaan terhadap umat Islam. Oleh beberapa pihak, GP dianggap tidak pro-Islam atau *islamophobia* karena salah satu kalimat dalam puisi tersebut berbunyi “kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat, kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat”. Pelaporan GP mulai diprediksi sebagai strategi politik semata setelah pelapor membatalkan laporannya setelah mengetahui bahwa puisi tersebut adalah karya seorang ulama (www.cnnindonesia.com, diunduh 24 Mei 2018). Pernyataan serupa juga dimuat dalam tirta.id yang menyebutkan bahwa dalam kasus tersebut, kepentingan politik lebih menonjol dari pada sentimen agama (tirta.id, diunduh 24 Mei 2018).

Lekatnya isu agama dan politik telah menarik minat para peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *political tolerance* terhadap kelompok yang berbeda agama. Para peneliti terdahulu mendasarai penelitiannya dengan mengartikan *political tolerance* sebagai toleransi kepada hak politik individu atau kelompok minoritas yang berbeda darinya. Dari pengertian tersebut, *religious-political tolerance* dapat dipahami sebagai penerimaan terhadap hak-hak politik orang lain yang berbeda agama. Hak tersebut dapat berupa tindakan-tindakan di ruang publik seperti berbicara, demonstrasi, menyebarkan *leaflet*, mengadakan pertemuan, serta penerimaan hak dipilih dan memilih orang lain.

Toleransi, termasuk toleransi dalam hal politik (*religious-political tolerance*) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian dengan metode studi pustaka yang dilakukan oleh Doorn (2012), diketahui beberapa

faktor determinan toleransi. Melalui penelitian tersebut diungkap bahwa pendidikan, internalisasi nilai-nilai demokrasi, persepsi terhadap ancaman kelompok, karakteristik kepribadian, serta beberapa faktor demografis menjadi faktor penting yang mempengaruhi apakah seorang individu akan menjadi toleran atau intoleran. Penelitian ini, Doorn menyarankan untuk mengkaji toleransi dari berbagai konteks. Saran tersebut diajukan berdasarkan pemahaman bahwa toleransi dipengaruhi oleh fenomena yang bersifat multi level, mulai dari tingkat individu hingga kelompok. Salah satu konteks yang diajukan Doorn adalah pengaruh bingkai atau *frame* suatu permasalahan sosial terhadap toleransi.

Eiseinstein (2014) meneliti tentang agama dan *political tolerance*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa agama secara tidak langsung agama berpengaruh terhadap *political tolerance* melalui keamanan psikologis. Beberapa dimensi dari agama secara langsung berpengaruh terhadap *political tolerance*. Dimensi tersebut antara lain kepercayaan, harga diri, serta dogmatisme. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Steward d.k.k (2017) yang mengungkap bahwa individu dengan *Public Religious Expression* memiliki hubungan yang lebih kuat dan konsisten terhadap prasangka kelompok-kelompok agama lain di AS. Kondisi tersebut memungkinkan toleransi politik antar kelompok menjadi lebih sulit untuk dibangun. Dalam penelitian lain, orientasi religiusitas non-muslim di Selandia Baru berkorelasi positif dengan toleransi terhadap muslim (Shaver, Troughton, Sibley, & Bulbulia, 2016).

Tingkat *religious-political tolerance* pada individu juga dipengaruhi oleh informasi yang ia terima. Suatu informasi yang diterima akan berimplikasi pada

bagaimana individu bersikap terhadap informasi tersebut. Penelitian tentang pengaruh peninjauan kembali suatu informasi terhadap *political tolerance* dilakukan oleh Halperin, d.k.k. (2014). Penelitian tersebut melibatkan 174 partisipan mahasiswa. Dalam eksperimen, partisipan diminta untuk memilih kelompok yang paling tidak disukai olehnya. Kemudian, partisipan akan disajikan dengan paragraf yang isinya berupa kritik terhadap kelompok yang tidak disukai. Paragraf tersebut dibuat sedemikian rupa agar mengarahkan partisipan pada intoleransi terhadap kelompok yang tidak disukai. Setelah disajikan paragraf tersebut, partisipan dalam kelompok eksperimen diberikan instruksi untuk menilai kembali apa yang dimuat dalam tulisan, sedangkan kelompok kontrol diberi instruksi yang netral. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kembali terhadap suatu informasi dapat menurunkan tingkat *political intolerance* kepada etnis dan agama minoritas. Penurunan tingkat *political intolerance* tersebut dimediasi oleh tingkat emosi negatif dan dukungan terhadap nilai demokrasi.

Tingkat pengetahuan politik seseorang akan mempengaruhi *political tolerance* baik yang mengenai agama maupun di luar agama. Hal tersebut dibuktikan melalui eksperimen Hall (2017) yang dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan politik terhadap *political tolerance*. Hall berlandaskan pada teori bahwa pendidikan akan membawa pada keterbukaan dan kemampuan individu untuk menerima keberagaman. Penelitian ini melibatkan 249 partisipan dan dilakukan dengan cara memberikan kursus untuk meningkatkan pengetahuan politik partisipan. Setelah dilakukan *pretest*, dibentuk kelompok eksperimen satu

(88 partisipan) yang diberikan materi mengenai hukum kesetaraan pernikahan dan hak gay. Kelompok eksperimen dua (68 partisipan) diberi materi tentang peraturan mengenai kebebasan warga negara dan campur tangan pemerintah dari sudut pandang agama. Kelompok ketiga tidak diberi perlakuan apapun. Setelah diberikan perlakuan, pada kelompok pertama dimana diberikan perlakuan spesifik tentang pernikahan dan gay, tingkat *political tolerance* terhadap seorang gay menjadi meningkat.

Memperkuat kasus dan hasil penelitian terdahulu, studi pendahuluan yang dilakukan pada 1 Juni 2018 menunjukkan bahwa kecenderungan responden untuk tidak memilih pemimpin yang berbeda agama tergolong tinggi.

Tabel 1.1 Tabulasi Hasil Studi Pendahuluan

Pertanyaan	Respon	frekuensi	%
Apakah anda bersedia memilih calon pemimpin yang berbeda agama?	Ya	19	45%
	tidak	23	55%
Apakah pernah mendapat/melihat ajakan untuk tidak memilih calon pemimpin yang berbeda agama?	ya	42	100%
	Tidak	-	-
Dimana anda melihat atau mendapat ajakan tersebut?	Media	32	76%
	Langsung	10	24%

Tabel 1.2 Alasan Memilih dan Tidak Memilih Calon Pemimpin yang Berbeda Agama

Kategori	Jumlah	%
Alasan Tidak Memilih		
kepercayaan	10	45%
kafir	3	14%
Mendahulukan yang seagama	5	23%
tidak suka/tidak setuju	4	18%
Jumlah	22	100%
Alasan Memilih		
Kapasitas calon	8	42%
keberagaman	8	42%
Tanpa pertimbangan	3	16%
jumlah	19	100%

Responden dalam studi pendahuluan melibatkan 42 responden. 55% diantaranya menyatakan tidak bersedia memilih calon pemimpin yang berbeda agama (tabel 1.1). Melalui pertanyaan terbuka mengenai alasan responden tidak mau memilih, didapatkan data bahwa 45% responden tidak bersedia memilih karena bertentangan dengan keyakinan mereka, 23% menyatakan lebih mendahulukan yang seagama, 18% karena tidak menyukai dan tidak setuju terhadap pemimpin yang berbeda agama, serta 14% lainnya mengatakan tidak bersedia memilih karena kafir (tabel 1.2). Sementara itu, 42% responden yang bersedia memilih, mengungkapkan kesediaannya atas dasar kapasitas dan kemampuan calon pemimpin. Alasan keberagaman Indonesia diungkapkan 42% responden yang bersedia memilih, dan 16% sisanya hanya sekedar memilih tanpa pertimbangan tertentu (tabel 1.2). Selain itu, hasil studi pendahuluan juga memuat bahwa 76% responden mengetahui ajakan untuk tidak memilih calon pemimpin yang berbeda agama di sosial media. Sedangkan 24% responden menyatakan

pernah diajak secara langsung untuk tidak memilih calon pemimpin yang berbeda agama (tabel 1.1). Studi pendahuluan ini menunjukkan bahwa intensi tidak memilih calon pemimpin yang berbeda agama yang menjadi indikator rendahnya *religious-political tolerance*, dibarengi dengan ajakan baik di sosial media atau secara langsung untuk tidak memilih.

Ajakan untuk tidak memilih calon pemimpin yang berbeda agama serta kasus yang dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa atribut agama seringkali digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik atau membangun citra politiknya sendiri. Salah satu cara umum yang digunakan adalah *framing*. *Framing* merupakan pemingkalian realitas untuk diarahkan sesuai keinginan. Artinya, suatu informasi sengaja dipotret dari sudut pandang tertentu untuk mengarahkan pembaca/pemirsa pada persepsi tertentu tentang objek informasi. Kaitannya dengan agama dan politik yang dibahas dalam penelitian ini, suatu berita atau informasi lain sengaja dibentuk dengan *frame* tertentu untuk diarahkan pada kesimpulan bahwa memilih calon pemimpin yang berbeda agama adalah salah. *Frame* tersebut menggunakan *negative information* yang membahas mengenai kekurangan, kelemahan, serta dampak buruk jika seorang pemimpin berasal dari agama yang berbeda.

Pemilihan sudut pandang dalam membuat berita tidak lepas dari hoax. Peneliti Wahid Institute menilai maraknya penyebaran kebencian melalui media sosial sebagai gejala menurunnya toleransi. Dalam bbc.com, disoroti konten-konten hoax yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik sebagai media untuk mempengaruhi pikiran pembaca berita pada pemahaman tertentu (www.bbc.com,

diunduh 16 April 2018). Fakta terbaru adalah terorganisirnya berita bohong di media sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan terbongkarnya sindikat Saracen yang diduga aktif menyebarkan berita bohong bernuansa SARA di media sosial sesuai pesanan (www.bbc.com, diunduh 16 April 2018).

BBC menyoroti penggunaan identitas agama dan etnis dalam perpolitikan yang semakin menguat setelah semakin berpengaruhnya berita bohong atau hoax di media sosial. Bahkan, berita bohong dan SARA menjadi semacam strategi untuk memenangkan kelompok politik (www.bbc.com, diunduh 29 April 2018). Pada akhirnya, ketegangan-ketegangan yang muncul di media sosial berpotensi menjadi polarisasi etnis dan agama. Jika sudah terjadi polarisasi, maka akan tercipta sentimen anti agama atau etnis tertentu yang sudah jelas akan memicu semakin rendahnya toleransi politik.

Terkait dengan politik dan media berita, Ernst (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui efek pengulangan pernyataan dan pesan negatif dalam konteks komunikasi kampanye. Penelitian tersebut menggunakan metode eksperimen dimana partisipan disajikan dengan poster kampanye yang berisi informasi negatif. Dari jumlah keseluruhan 205 partisipan, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan disajikan poster positif dan kelompok kedua disajikan poster negatif. Untuk mengamati pengaruh pengulangan informasi, masing-masing kelompok dibagi lagi menjadi tiga kelompok. Tiga kelompok tersebut akan disajikan masing-masing satu, tiga, dan enam kali pengulangan informasi yang berupa poster negatif. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pengulangan poster negatif akan menyebabkan sikap yang cenderung lebih

negatif terhadap isu politik yang ada di poster. Penelitian ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Matthes (2012), bahwa orang tidak tanpa berpikir mengikuti *frame* media berita. Ada beberapa faktor yang menentukan apakah individu akan terpengaruh oleh *frame* atau tidak. Salah satu dari faktor tersebut adalah hanya *frame* yang diberikan secara berulang yang dapat memberikan efek yang besar.

Hasil yang tidak jauh berbeda juga didapatkan dari penelitian Lechler (2015). Lechler mengkaji bagaimana paparan berulang pada *frame* berita berpengaruh pada opini politik di setiap waktu. Dalam eksperimen tersebut, sebanyak 296 partisipan terus diberikan berita dengan *frame* yang sama (dibagi menjadi tiga kelompok: hanya diberi di awal penelitian, diberi setiap satu hari, satu minggu, dan setiap dua minggu). Kemudian diukur efeknya pada opini politik. Hasilnya menunjukkan bahwa pengulangan *frame* memberikan efek yang lebih besar pada opini politik. Selain itu, efek persistensi yang paling banyak terdapat pada individu dengan pengetahuan politik moderat.

Sementara itu, penelitian Utych (2018) mengkaji tentang penggunaan bahasa dan pengaruhnya terhadap perilaku politik. Efek afektif bahasa bergantung pada kompleksitas pengambilan keputusan. Dalam tugas pemrosesan yang lebih sederhana, individu menggunakan emosi sebagai heuristik. Hal ini menyebabkan kesalahan atribusi dari penggeneralisasi efek negatif pada target politik. Ketika keputusan kompleks, bahasa afektif berpengaruh pada bagaimana informasi baru disimpan di dalam memori, bersama dengan peningkatan ingatan dan berfikir abstrak. Bagi mereka yang terpapar bahasa negatif, evaluasi terhadap politisi akan

tetap lebih kuat di memori, sedangkan evaluasi tersebut akan memudar ketika digunakan sebagai heuristik.

Berbagai kasus dan hasil penelitian sebelumnya, mengartikan *negative information* sebagai pesan yang disampaikan melalui media lisan, tulis, atau media massa yang terfokus pada pembahasan mengenai kelemahan atau kekurangan dari individu atau kelompok tertentu. *Negative information* sengaja dibuat dengan strategi *framing* yang lebih banyak menampakkan informasi-informasi negatif tentang objek informasi dari pada yang positif.

Penelitian ini terfokus pada calon pemimpin yang berbeda agama sebagai objek *negative information framing*. Artinya, *negative information* dalam penelitian ini adalah informasi mengenai kelemahan, kekurangan, risiko, serta dampak yang akan terjadi jika seorang pemimpin berasal dari agama yang berbeda dari agama mayoritas. *Negative information framing* tentang calon pemimpin berbeda agama diprediksi mempengaruhi *religious-political tolerance* karena ia akan diterima sebagai pengetahuan oleh individu. Selain itu, sifat *negative information* yang bisa mempengaruhi afeksi seseorang memungkinkan individu yang terpapar *negative information framing* tentang calon pemimpin yang berbeda agama akan memberikan emosi atau perasaan yang buruk kepada calon tersebut. Apabila individu telah memiliki pengetahuan yang buruk dan perasaan yang negatif terhadap calon pemimpin yang berbeda agama, maka akan muncul intensi untuk tidak memilih calon tersebut dalam pemilihan umum. Kondisi dimana individu enggan atau tidak mengizinkan orang yang berasal dari agama minoritas untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin ini merupakan kondisi yang

merepresentasikan rendahnya *religious-political tolerance*. Oleh karena itu penelitian ini diajukan untuk mengkaji secara teoritis pengaruh *negative information framing* terhadap *religious-political tolerance*.

Berbagai uraian tentang *political tolerance* dan *framing negative information* yang dibahas, membawa peneliti pada tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh *framing negative information* terhadap *political tolerance*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran *religious-political tolerance* pada kelompok yang terpapar *negative information framing*.
2. Bagaimana gambaran *religious-political tolerance* pada kelompok yang tidak terpapar *negative information framing*.
3. Apakah ada pengaruh *negative information framing* terhadap *religious-political tolerance*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran *religious-political tolerance* pada kelompok yang terpapar *negative information framing*.
2. Mengetahui gambaran *religious-political tolerance* pada kelompok yang tidak terpapar *negative information framing*.
3. Mengetahui pengaruh *negative information framing* terhadap *religious-political tolerance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Menjadi rekomendasi bagi Pemerintah untuk menjaga situasi toleransi politik.
2. Menjadi rekomendasi bagi Pemerintah untuk membuat regulasi Pemilu yang dapat meminimalisir penggunaan isu yang dapat merendahkan *religious-political tolerance*.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih teoritis berupa pemahaman baru mengenai pengaruh *negative information framing* terhadap *political tolerance*.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 *Religious-Political Tolerance*

2.1.1 *Pengertian Religious-Political Tolerance*

Vogt (1994) mengklasifikasikan toleransi menjadi tiga bagian, yaitu *political tolerance*, *moral tolerance*, dan *social tolerance*. Vogt mengartikan *political tolerance* sebagai toleransi kepada tindakan-tindakan di ruang public seperti berbicara, demonstrasi, menyebarkan *leaflet*, mengadakan pertemuan, dan lain-lain. Jenis toleransi ini fokus pada dukungan kebebasan warga negara, terutama kelompok yang tidak populer atau tidak disukai. Vogt juga menambahkan bahwa *political tolerance* sangat fundamental dalam menentukan dan mempertahankan jenis toleransi yang lain. *Political tolerance* merujuk pada dukungan untuk hak warga negara seperti perbedaan agama, etnis, politik, budaya, dan gender.

Political tolerance biasanya didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengizinkan suatu kelompok yang tidak disukai untuk terlibat dalam kebebasan berekspresi (Eiseinstein, 2014). Tidak jauh berbeda dengan berbagai pengertian lain, menurut Petersen (2010) *political tolerance* melibatkan penerimaan hak politik orang lain.. Bahkan menerima dengan hormat yang orang lain tidak setuju atau sebenarnya takut terhadap hal tersebut. Hak politik yang dimaksud di sini meliputi hak yang dijamin oleh negara, seperti hak menyampaikan pendapat, serta hak dipilih dan memilih. Sementara itu, Sullivan (1999) mendefinisikan toleransi

sebagai kesediaan untuk menerima sesuatu yang bertolak belakang atau berlawanan. Dari segi politik, hal ini mengimplikasikan bahwa toleransi merupakan kerelaan untuk mengizinkan suatu gagasan atau ketertarikan yang berbeda. Salah satu kunci penting dalam memahami toleransi adalah adanya pertentangan atau ketidaksetujuan. Oleh karena itu, individu yang menerima kepercayaan atau kebiasaan yang ia dukung tidak bisa dikatakan sebagai toleransi. Permasalahan toleransi hanya muncul ketika terdapat ketidaksepakatan atau pertentangan sebagai dasar. Apa yang dilakukan individu terhadap ketidaksepakatan atau pertentangan itu lah yang disebut toleransi.

Berbeda dengan *political tolerance*, *religious tolerance* didefinisikan sebagai jaminan kebebasan bagi orang lain untuk memilih dan beribadah sesuai keyakinannya (Mensching dalam Benson, 2016). Putman & Campbell dalam Hook d.k.k (2015) mendefinisikan *religious tolerance* sebagai seperangkat sikap dan perilaku yang melibatkan kepedulian terhadap hak-hak orang lain untuk memeluk agama yang diyakini dan menjalankan ibadah tanpa hambatan. Serupa dengan konsep *religious tolerance*, Mursyid (2016) mendefinisikan toleransi antar umat beragama sebagai toleransi yang mengedepankan sikap yang saling menghormati antar pemeluk agama. Saling menghormati yang dimaksud disini terkait dengan pengamalan masing-masing ajaran agama.

Selain *political tolerance* dan *religious tolerance*, kasus-kasus seperti yang diungkap di latar belakang mengarah pada *political tolerance* terhadap orang dengan agama yang berbeda, kemudian dapat disebut dengan *religious-political tolerance*. *Religious-political tolerance* lebih tepat digunakan daripada *religious*

tolerance karena penelitian ini fokus pada toleransi terhadap hak politik dari orang yang berbeda agama, bukan pada keyakinan atau ritual dalam agama itu sendiri.

Uraian mengenai definisi *religious-political tolerance* ini dapat disimpulkan bahwa *religious-political tolerance* merupakan kesediaan, penerimaan, serta dukungan terhadap hak politik orang dari agama yang berbeda.

2.1.2 Komponen *Religious-Political Tolerance*

Seperti yang uraikan dibagian sebelumnya, *religious-political tolerance* merupakan toleransi terhadap hak politik orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, komponen yang digunakan mengacu pada teori *political tolerance*. Vogt (dalam Doorn, 2012) menjelaskan, sebagai sebuah sikap, toleransi terdiri dari tiga komponen yaitu *cognitive belief*, evaluasi afektif terhadap objek, dan orientasi perilaku (*behavioural*) pada objek.

- a. Komponen kognitif berisi semua pemikiran dan ide-ide yang berkenaan dengan objek sikap. Isi pemikiran tersebut bisa berupa hal-hal yang diketahui seputar objek sikap, tanggapan atau keyakinan, kesan, atribusi, atau penilaian tentang objek sikap tersebut (Sarwono, 2015:83). Terkait dengan politik, Sarwono menyebutkan bahwa komponen kognitif dapat berupa pengetahuan tentang Parpol apa saja yang mengikuti Pemilu, calon siapa saja yang mewakili partai A, serta bagaimana cara memilihnya. Pengetahuan itu juga melibatkan tanggapan terhadap partai politik atau para calon yang diperoleh dari media. Misalnya ketika individu mengetahui keburukan perilaku seorang calon pemimpin melalui media massa. Aspek evaluatif ini membuat

komponen kognitif dari sikap dapat menentukan keputusan individu untuk tidak memilih calon pemimpin tersebut.

- b. Menurut Sarwono (2015:83), komponen afektif meliputi perasaan atau emosi seseorang terhadap objek sikap. Komponen ini dapat diketahui melalui perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Adanya komponen afektif dapat mendorong sikap menjadi daya atau kekuatan. Apabila individu menyukai caleg dari partai A, maka akan cenderung untuk memilih calon tersebut dari pada calon yang lain. Hal ini terjadi karena adanya dorongan perasaan dan keyakinan yang positif tentang calon tersebut.
- c. Komponen perilaku dapat diketahui melalui respon subjek yang berkenaan dengan objek sikap. Respon tersebut dapat berupa perbuatan yang dapat diamati dan dapat berupa intensi atau niatan untuk melakukan perbuatan terhadap objek sikap (Sarwono, 2015:84). Ketika individu memiliki pengetahuan yang luas dan didukung dengan perasaan positif mengenai kognisinya tentang Caleg dari partai A, maka akan muncul kecenderungan untuk mendekatinya. Kecenderungan itu dapat berupa memberi dukungan, bantuan, dan memilih dalam pemilu.

Uraian tersebut membawa pada kesimpulan bahwa sebagai sikap, *political tolerance* terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan perilaku.

2.1.3 Indikator *Religious-Political Tolerance*

Indikator *religious-political tolerance* ini merupakan kerangka utama yang akan akan dikembangkan menjadi alat ukur penelitian. Sebagai bagian dari konsep

political tolerance, Indikator *religious-political tolerance* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 6 indikator yang dikembangkan oleh Sullivan (1981).

Berikut adalah indikator tersebut.

- a. Mengizinkan berbicara di hadapan publik.
- b. Mengizinkan menjabat di kantor pemerintahan.
- c. Mengizinkan untuk mengadakan demonstrasi/kegiatan di ruang publik.
- d. Mengizinkan agar telepon pribadi tidak perlu disadap.
- e. Mengizinkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.
- f. Mengizinkan untuk memberikan materi di sekolah.

Berbeda dengan Sullivan, Burchianti (2013:6) menggunakan beberapa hal berikut sebagai indikator tinggi atau rendahnya *political tolerance* di suatu negara.

- a. *Existence of Legislation that Punishes Racist Discourse*. Indikator ini digunakan untuk menilai suatu kerangka hukum di suatu negara sebagai antisipasi dari ujaran kebencian dan wacana publik yang bersifat rasis.
- b. *Application of Such Legislation In Recent Times*. Negara-negara dengan *political tolerance* yang tinggi telah menerapkan hukum yang berkaitan dengan hak warga negara.
- c. *Anti-immigrant and anti-minority parties*. Adanya partai ekstrim kanan dan anti imigran serta anti minoritas, menjadi suatu tanda bahwa negara tersebut memiliki *political tolerance* yang rendah.
- d. *Racist violence in public life (ethnic)*. Banyaknya frekuensi kekerasan rasis terhadap etnis tertentu yang terjadi di ruang publik menjadi indikator rendahnya *political tolerance*.

- e. *Racist violence in public life (religious)*. Tingginya *political tolerance* dibuktikan dengan rendahnya kekerasan di ruang public yang mengatasnamakan agama.
- f. *Influence of Radical Far Right or Anti-Immigrant Parties*. Tidak adanya hubungan antara pemerintah atau partai di pemerintahan dengan organisasi radikal menjadi indikator tingginya *political tolerance*.
- g. *Media Mainstreaming of Anti-Immigrant or Anti-Minority*. Negara dengan tingkat *political tolerance* yang tinggi, medianya bersikap netral terhadap minoritas dan tidak dikuasai oleh kelompok tertentu.

Berdasarkan indikator yang telah diungkap, peneliti menggunakan indikator Sullivan untuk dikembangkan menjadi instrumen penelitian. Indikator tersebut antara lain 1) mengizinkan berbicara di hadapan publik, 2) mengizinkan menjabat di kantor pemerintahan, 3) mengizinkan untuk mengadakan demonstrasi/kegiatan di ruang publik, 4) mengizinkan agar telepon pribadi tidak perlu disadap, 5) mengizinkan perlindungan yang sama di hadapan hukum, 6) mengizinkan untuk memberikan materi di sekolah.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Religious-Political Tolerance*

Menurut Hazama (2010), *political tolerance* dipengaruhi oleh beberapa hal, baik di level individu maupun di level situasional/kontekstual. Beberapa hal tersebut akan sangat menentukan tingkat *political tolerance*. Di level individu, *political tolerance* dipengaruhi oleh *authoritarianism*, pendidikan, kontak, dan ancaman. Sedangkan, kebijakan dan sistem negara serta keberagaman etnis menjadi faktor penentu yang kontekstual.

1. Level Individu

a. *Authoritarianism*

Authoritarianism dianggap sebagai salah satu karakteristik utama yang tertanam dalam individu yang memiliki kecenderungan mempengaruhi *political tolerance* sekaligus prasangka pada individu. Adorno (dalam Hazama, 2010) menyimpulkan, pada dasarnya *Authoritarianism* dan hubungan orang tua-anak yang eksploitatif cenderung membawa kepada orientasi kekuasaan, perilaku yang terikat pada satu pasangan, serta satu tuhan. Mungkin juga mengarah pada disposisi untuk menghargai kekuatan dan menurunkan kelemahan.

b. Pendidikan

Dalam beberapa penelitian, pendidikan digunakan sebagai variable kontrol karena telah pasti bahwa semakin berpendidikan, maka seseorang akan semakin toleran. Meskipun demikian, hubungan yang spesifik antara pendidikan dan toleransi masih harus diungkap lebih lanjut lagi. Selain itu, pendidikan dapat menurunkan prasangka etnis dengan bertambah luasnya pendidikan dan informasi, bertambahnya kapasitas kognitif, dan pengenalan terhadap nilai dan norma universal.

c. Kontak

Berbagai macam kontak antar kelompok yang lebih intens akan mengurangi prasangka antar etnis. Di Afrika Selatan, *political tolerance* berkorelasi dengan kontak antar-ras dan persepsi ancaman, namun tidak berkorelasi dengan identitas kelompok.

d. Ancaman

Hazama (2010) mengungkapkan bahwa persepsi terhadap ancaman kelompok sosial atau ancaman sosiotropik adalah factor penentu yang kuat terhadap toleransi. Literatur mengenai toleransi sangat terfokus pada mediasi antara persepsi ancaman dan toleransi. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap ancaman memiliki efek yang signifikan terhadap toleransi. Efek tersebut dimediasi oleh predisposisi dari individu. Ketika seseorang lebih cenderung untuk mempersepsikan ancaman, maka ia cenderung lebih intoleran.

2. Level Kontekstual

a. Kebijakan dan Sistem Negara

Kebijakan dan system kenegaraan seperti konstitusi, kesejahteraan, rezim, atau demokrasi yang mapan, secara substansial berpengaruh terhadap toleransi di tingkat Negara. Peffley & Rohrschneider (dalam Hazama, 2010) mengungkapkan bahwa *political tolerance* akan meningkat dengan adanya keseimbangan demokrasi dan federalisme di level makro.

b. Keberagaman Etnis

Akibat dari keberagaman etnis pada toleransi etnis melibatkan dua efek. Pertama, keberagaman etnis meningkatkan frekuensi kontak antara minoritas dan mayoritas. Di sisi lain, kehadiran minoritas yang besar akan berkembang menjadi persepsi ancaman sosiotropik pada kelompok mayoritas. Dengan keberagaman etnis yang dapat meningkatkan kontak dan persepsi ancaman, maka impilkasinya pada toleransi tidak seragam. Efek mana yang akan muncul sangat bergantung pada situasi. Dalam literatur yang berkembang, Hazama (2010) menjelaskan

bahwa efek kontak relatif lebih kuat dari pada efek ancaman ketika (1) keberagaman etnis berada di level cukup (moderat) dan (2) keberagaman etnik diukur ketika agregat pada level rendah.

Sementara itu, Sullivan & Transue (dalam Doorn, 2012) menyebutkan ada empat factor yang mempengaruhi toleransi. Empat faktor tersebut adalah pendidikan, internalisasi nilai, *percepolitical toleranceion of threat*, dan karakteristik kepribadian.

a. Pendidikan

Seiring dengan bertambah tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan toleransi akan meningkat. Orang-orang dengan pendidikan tinggi menampilkan kepatuhan yang lebih terhadap kebebasan warga negara. Sementara orang yang berpendidikan rendah lebih sedikit menampilkan hal tersebut terhadap kelompok yang tidak disukai. Selain meningkatkan toleransi, bertambahnya pendidikan juga dapat mengurangi stereotype dan prasangka politik, sosial, dan moral.

b. Internalisasi nilai demokrasi

Nilai-nilai demokrasi berperan sebagai pendukung prinsip utama demokrasi seperti hak minoritas, aturan mayoritas, serta kesetaraan di mata hukum dan mengutarakan pendapat. Sullivan mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap nilai-nilai demokrasi memiliki efek positif pada *political tolerance* pada kelompok spresifik. Sullivan juga menggunakan perbandingan dari penelitian internasional. Hasilnya, budaya dan berbagai macam jenis nilai demokrasi yang dianut oleh sebuah negara, memberikan pengaruh yang berbeda terhadap

toleransi. Konteks politik dalam hal ini adalah ketika nilai yang telah diinternalisasi diterapkan pada isu-isu kelompok yang spesifik. Yang menarik, Sullivan menemukan bahwa nilai demokrasi merupakan variable intermediet antara pendidikan dan *political tolerance*. Mengindikasikan bahwa salah satu efek dari tingginya pendidikan adalah nilai demokrasi. Kemudian, nilai tersebut diasosiasikan dengan tingginya kemungkinan toleransi.

c. Ancaman

Ancaman diidentifikasi sebagai sumber penting dari munculnya intoleransi. Gibson (dalam Doorn, 2006) memberikan penjelasan bahwa siapa yang merasa terancam oleh lawan politiknya, relatif lebih rendah dalam mentoleransi mereka. Gibson menambahkan bahwa perbedaan jenis dari persepsi ancaman (*threat percepolitical toleranceion*) dan ancaman yang dirasakan (*threat perceived*) dari kelompok target yang berbeda perlu dibuat. Pada penelitian terkini, memang dibedakan antara *safety threat* dan *symbolic threat*. Penelitian membuktikan bahwa akibat dari konflik nilai terhadap toleransi lebih besar jika dibandingkan akibat konflik ekonomi antar kelompok. Gibson juga menambahkan bahwa siapa yang melihat ancaman pada gaya hidup (*way of life*) mereka, cenderung lebih intoleran daripada yang melihat ancaman pada keamanan personal mereka.

d. Faktor Kepribadian

Sullivan (dalam Doorn, 2012) menyebutkan bahwa dogmatism, misantropi, gaya *child-rearing* yang keras, pesimisem, neurotisme, dan extraversion, berkorelasi positif dengan intoleransi. Sementara fleksibilitas, *self-*

esteem, keterbukaan pada pengalaman, dan kepercayaan berkorelasi positif dengan toleransi. Keterbukaan pada pengalaman menjadi prediktor terkuat toleransi, sedangkan *psychological insecurity* menjadi prediktor terkuat intoleransi. Hubungan antara kepribadian dan toleransi juga ditegakkan oleh pendidikan. Hal tersebut karena adanya indikasi bahwa personality trait dapat diubah dengan pendidikan. Karakteristik kepribadian mempengaruhi pencarian informasi yang valid, juga mungkin ada efek interaksi antara pendidikan dan kepribadian yang berakibat pada toleransi yang lebih besar.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *political tolerance* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain nilai demokrasi serta internalisasi terhadap nilai tersebut, keragaman etnis, pengaruh kepribadian, kontak antar kelompok, serta dua faktor yang paling berpengaruh yaitu pendidikan dan persepsi terhadap ancaman.

2.2 Negative Information Framing

2.2.1 Pengertian Negative Information Framing

2.2.1.1 Framing

Gamson & Modigliani (dalam Mulyana, 261) memandang *framing* sebagai sebuah cara bercerita atau gugusan ide yang disusun dan terorganisir untuk menghadirkan makna pada peristiwa tertentu. Gamson & Modigliani menyebut cara pandang itu sebagai sebuah *package* (kemasan), yaitu sebuah struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan yang disampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan yang diterima komunikan. *Package* tersebut tersusun dari *framing device* seperti penggunaan kalimat,

gambar, atau sebagainya. Semua elemen tersebut mengarah pada ide sentral sebuah *frame* yang ingin dibentuk.

Mendukung pengertian sebelumnya, Mulyana (2011) mendefinisikan *framing* sebagai sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui perspektif atau cara pandang seorang wartawan dalam mengkonstruksi dan menulis berita. Cara pandang tersebut akan menentukan fakta mana yang perlu diambil, bagian mana yang perlu ditonjolkan, dan kesimpulan bagaimana yang akan diharapkan penulis.

Reese (dalam Mathes, 2012) menjelaskan bahwa *frame* adalah prinsip pengorganisasian yang dibagi secara sosial, atau dengan arti lain menyusun dunia sosial. Lebih lanjut, Reese menjelaskan *frame* adalah bagian dari budaya yang memandu bagaimana membangun sebuah informasi melalui pemilihan informasi oleh wartawan dan terwujud dalam teks media untuk mempengaruhi sikap dan kognisi audiens. Reese menilai konsep *Framing* adalah untuk memberikan model.

Strategi *framing* adalah *frame* yang diseleksi dan dimodifikasi oleh jurnalis sesuai dengan *frame* mereka. *Framing* berguna bagi jurnalis untuk menyesuaikan dengan arus informasi. *Framing* terwujud dalam konten media berita seperti perbedaan cara media dalam membingkai isu politik. Sementara itu, Mathes (2012) juga menyebutkan bahwa gagasan kunci dalam memahami *framing* adalah strategi aktor/pembawa berita, jurnalis, dan pemirsa tidak selalu mencerminkan realitas sosial dan politik. Sebaliknya, peristiwa dan isu politik

membawa subjek pada pola seleksi dan interpretasi yang berbeda. Interpretasi dari isu tersebut dinegosiasikan, diperebutkan, dan dimodifikasi seiring dengan waktu.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *framing* dapat diartikan sebagai pilihan sudut pandang dari sebuah isu. Sudut pandang tersebut membangun realitas dengan cara tertentu dan mengarahkan pembaca atau pemirsa pada evaluasi dan rekomendasi yang berbeda (Matthes, 2012). *Frame* dapat ditemukan dalam strategi komunikasi politik dan organisasi, struktur kognitif jurnalis, media berita, dan di pikiran masyarakat. Lebih khusus, komunikator seperti elit politik, gerakan sosial, pelobi, dan aktivis mengembangkan *frame* tentang suatu isu dan berusaha menetapkan isu tersebut dalam berita dan wacana publik (Hangli & Kriesi dalam Matthes, 2012). Teori pergerakan sosial memahami *framing* sebagai strategi untuk menggerakkan publik. Seperti pendapat Snow & Benford (1992) bahwa *framing* yang sukses harus mendiagnosis masalah, merancang solusi dan taktik, serta memotivasi pada aksi pergerakan.

Berbagai pengertian tentang *framing* yang diulas, disimpulkan bahwa *framing* merupakan cara mengorganisir dan menyusun sebuah gagasan untuk menghadirkan makna tertentu.

2.2.1.2 *Negative Information*

McCreadie (1999) berpendapat bahwa dalam memahai informasi, perlu ditegaskan dari sudut pandang mana informasi akan dikaji. Oleh karena itu, McCreadie menjelaskan informasi dalam beberapa konsep sebagai berikut.

- a. Sebagai representasi dari pengetahuan, informasi merupakan pengetahuan yang tersimpan.

- b. Sebagai data yang ada di lingkungan, informasi dapat diperoleh dari berbagai stimulus lingkungan dan fenomena. Meskipun tidak semua stimulus lingkungan dimaksudkan untuk menyampaikan pesan, stimulus tersebut menjadi informatif ketika ditafsirkan dengan tepat.
- c. Sebagai bagian dari proses komunikasi, informasi lebih merujuk pada individu dari pada kata atau data.
- d. Sebagai sumber komoditas, informasi ditransmisikan dalam bentuk pesan dari pengirim ke penerima. Penerima menafsirkan sebuah pesan sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim.

Informasi juga digunakan dalam komunikasi di bidang politik. Ernst (2017) mengungkapkan bahwa salah satu karakteristik penting dari komunikasi politik adalah negativitas. Negativitas sering digunakan dan telah terbukti sebagai strategi yang ampuh dalam kampanye. Lau dan Pomper (2002) memberi pengertian kampanye negatif sebagai pembicaraan mengenai lawan politik yang biasanya terfokus pada kelemahan program, kualifikasi, atau prestasi mereka. Dalam media berita politik, negativitas adalah satu dari nilai berita yang paling relevan serta strategi yang paling sering digunakan oleh jurnalis (Galtung & Ruge dalam Ernst, 2017). Ernst juga menambahkan bahwa negativitas lazim digunakan dalam politik dan media berita kontemporer.

Berbagai pengertian di atas membawa pada kesimpulan bahwa *negative information* adalah pesan yang disampaikan melalui media lisan, tulisan, atau media massa yang berisi tentang kelemahan atau kekurangan individu atau kelompok tertentu.

2.2.1.3 *Negative Information Framing*

Berdasarkan uraian mengenai pengertian *framing* dan *negative information* dipahami bahwa *negative information* dapat dimunculkan atau diciptakan dengan strategi *framing*. Informasi dipilih dan terwujud berita yang membahas kekurangan, kelemahan, serta dampak buruk jika seorang pemimpin berasal dari agama yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kognisi dan sikap pembaca agar tidak memilih calon tersebut. Penjelasan tersebut dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa *negative information framing* adalah sebuah cara untuk mengorganisir dan menyusun ide dengan tujuan menciptakan makna pesan tentang kerugian dan kekurangan apabila memilih pemimpin dari agama yang berbeda.

2.2.2 *Framing Package*

Gamson (dalam Mulyana, 263) memandang bahwa *framing* dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan sentral ketika seseorang atau media akan memaknai isu tertentu. Untuk mendukung sebuah ide atau gagasan sentral tentang suatu isu, diperlukan perangkat-perangkat tertentu untuk mempermudah penyampaian ide tersebut. Berikut adalah perangkat *framing* menurut Gamson.

1. *Framing Device*

Perangkat *framing* atau *framing device* berhubungan dengan ide sentral yang ditekankan dalam suatu teks berita. Perangkat ini ditandai dengan penggunaan kata, kalimat, metafora, grafik, atau gambar tertentu. Perangkat *framing* terdiri dari beberapa bagian berikut.

- a. *Methapors*, yaitu perumpamaan atau pengandaian yang digunakan untuk mendukung gagasan sentral.
- b. *Catchphrases*, yaitu frase yang menarik, kontras, dan menonjol dalam suatu berita. Biasanya dapat berupa jargon atau slogan.
- c. *Exemplaar*, yaitu keterkaitan bingkai dengan contoh dan uraian. Dapat berupa teori atau perbandingan yang memperjelas bingkai.
- d. *Deciption*, yaitu peggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif, biasanya berupa leksikon atau kata untuk melabeli sesuatu.
- e. *Visual images*, yaitu gambar, grafik, atau citra yang mendukung bingkai foto secara keseluruhan.

2. *Reasoning Device*

Perangkat penalaran atau *reasoning device* berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks berita. Selain memuat kata dan kalimat, gagasan juga ditandai dengan dasar pembenar atau alasan tertentu. Melalui perangkat penalaran, pembaca dapat menerima pesan tersebut sebagai sebuah kebenaran, alamiah, dan wajar serta beralasan. Perangkat penalaran terdiri dari beberapa bagian berikut.

- a. *Roots*, yaitu analisis kausal atau sebab akibat.
- b. *Appeals to principle*, yaitu berupa premis dasar atau klaim-klaim moral.
- c. *Concequences*, yaitu konsekuensi yang didapat dari bingkai.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah *framing package* terdiri dari perangkat *framing* dan perangkat penalaran. Keduanya berfungsi sebagai pendukung gagasan sentral dalam suatu *framing*.

2.2.3 Efek *Negative Information Framing*

Dalam konteks politik, informasi negatif dan positif memiliki luaran yang berbeda. Informasi atau pengiklanan positif digunakan untuk membangun citra dari calon yang diusung, sedangkan informasi negatif merusak citra dari lawan politik. Jayswal (2017) menyebutkan bahwa kampanye dengan informasi negatif lebih efektif ketika digunakan oleh penentang, sedangkan calon petahana lebih efektif menggunakan kampanye positif. Dari studi literatur yang dilakukan oleh Jayswal (2017), informasi negatif memiliki beberapa efek kognitif, afektif, dan konatif pada target informasi tersebut. Berikut adalah beberapa efek tersebut.

a. Iklan Politik Negatif dan Evaluasi terhadap Calon

Ditemukan adanya korelasi yang positif antara paparan informasi negatif dengan evaluasi terhadap calon atau kandidat yang menjadi target. Pemilih yang terpapar berita negatif akan mengevaluasi calon tersebut sebagai calon yang tidak jujur, tidak tulus, dan tidak berhasil. Individu akan menimbang informasi negatif lebih dari pada informasi yang positif dalam penilaian kelayakan, pembentukan kesan, serta pembuatan keputusan untuk menilai atau memilih.

b. Iklan Politik Negatif dan Sikap

Iklan negatif dengan informasi yang substantif yang konkrit lebih mampu membedakan kualitas, posisi, dan kinerja kandidat dibandingkan informasi politik lain yang kurang eksplisit. Semakin besar perbedaan antar kandidat yang dirasakan oleh pemilih, maka kemungkinan polarisasi sikap pemilih juga lebih besar. Oleh karena itu, dengan memunculkan perbedaan yang jelas, pemilih dapat diarahkan untuk mendukung seorang kandidat dan tidak mendukung yang lain.

Dalam hal ini informasi negatif dapat menghasilkan efek yang diinginkan pada pemilih, yaitu untuk mendukung atau menentang seorang kandidat. Kondisi ini mengartikan bahwa informasi negatif dimaksudkan untuk menciptakan perasaan negatif terhadap target kandidat.

c. Iklan Politik Negatif dan Intensi Memilih

Ketika partai atau elit politik menggunakan informasi negatif, tujuannya adalah untuk merendahkan citra lawan dan membangun citra kandidat yang diusung. Pada akhirnya, informasi negatif ditujukan untuk membujuk pemilih agar memilih kandidat atau calon yang diusung oleh partai tersebut. Pemaparan berita yang disematkan informasi negatif terhadap seorang kandidat menunjukkan efek bahwa pemirsa akan cenderung untuk tidak memilih kandidat tersebut. Dalam hal ini, pemirsa juga menganggap bahwa iklan atau informasi dari media independent lebih dapat dipercaya dari pada informasi dari partai atau media politik.

Comstok (2005:107) menemukan bahwa media berita condong ke arah berita buruk. Hal itu tercermin dari banyaknya cerita yang negatif dari pada yang positif hampir di semua jenis berita. Comstok juga mengungkapkan bahwa sebagian besar direktur televisi mempercayai bahwa peristiwa-peristiwa buruk lebih menarik untuk dibuat berita dari pada peristiwa yang baik. Graber dalam Comstok (2005:108) menunjukkan data bahwa hanya 17% *headline* berita di Amerika yang dikategorikan bagus. Sisanya dikategorikan sebagai berita buruk seperti kematian, kesakitan, bahaya, dan ancaman. Penelitian ini dilakukan Graber antara hari buruh hingga pemilu Amerika 1984 di ABC, CBS, dan NBC.

Kecenderungan negatif media berita mengakar pada ekspektasi terhadap respon pembaca dan penonton. Pernyataan ini sesuai dengan temuan psikologis bahwa berita negatif lebih mudah untuk ditanggapi daripada berita positif (Comstok, 2005:204). Hal serupa juga disampaikan oleh Fridkin (2011) bahwa informasi negatif lebih mudah mendapatkan perhatian dari seseorang. Alasan mengapa individu lebih memberikan perhatian untuk membaca informasi negatif adalah isi dari informasi tersebut yang memuat petunjuk tentang situasi atau kejadian yang harus dihindari. Fridkin juga memberi tambahan untuk informasi negatif bahwa seseorang akan memperhatikan pesan atau informasi ketika dipersepsikan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Uraian tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa *negative information framing* mampu mempengaruhi evaluasi kognitif individu terhadap calon pemimpin. Individu akan menyimpulkan calon tersebut sebagai calon yang tidak layak untuk dipilih. Selanjutnya, evaluasi tersebut akan memunculkan kecenderungan untuk tidak memilihnya di pemilihan umum.

2.3 Pengetahuan Politik Terkait Pemilu

2.3.1 Pengertian Pengetahuan Politik Terkait Pemilu

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota (KPU, 2010).

Pastarmadzhieva (2015) mendefinisikan pengetahuan politik sebagai pengetahuan individu tentang elemen-elemen politik. Pengetahuan politik juga bisa didefinisikan sebagai fakta tentang sistem politik yang dapat di *recall* seorang individu dari memorinya dan digunakan untuk memahami kejadian politik yang terjadi.

Berdasarkan pengertian pemilu dan pengetahuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Terkait Pemilu adalah pengetahuan tentang proses pemilihan umum dan semua komponen-komponennya.

2.3.2 Aspek Pengetahuan Politik Terkait Pemilu

Beberapa modul sosialisasi Pemilu keluaran Komisi Pemilihan Umum memuat bahasan yang sama. Artinya, bahasan tersebut adalah pokok penting yang harus diketahui oleh seorang pemilih. Adapun modul yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pemilu untuk Pemula Jilid 1 (Sistem dan Peserta Pemilu) oleh Handoyo, d.k.k (2013)
2. Pemilu untuk Pemula Jilid 2 (Proses Pemilihan dan Pengawasan) oleh Handoyo, d.k.k (2013)
3. Modul 1 “Pemilu untuk Pemula” oleh Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jendral KPU (2010)
4. Modul 2 “Siap Menjadi Pemilih” oleh Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jendral KPU (2010)
5. Modul 3 “Memilih dengan Cerdas dan Cermat” oleh Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jendral KPU (2010)

Bahasan dalam modul-modul tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu 1) Sistem dan Proses Pemilu di Indonesia, 2) Sejarah pemilu di Indonesia, 3) Identifikasi Aktor Pemilu. Tiga tema ini akan dijadikan sebagai komponen untuk menyusun instrumen pengetahuan terkait pemilu.

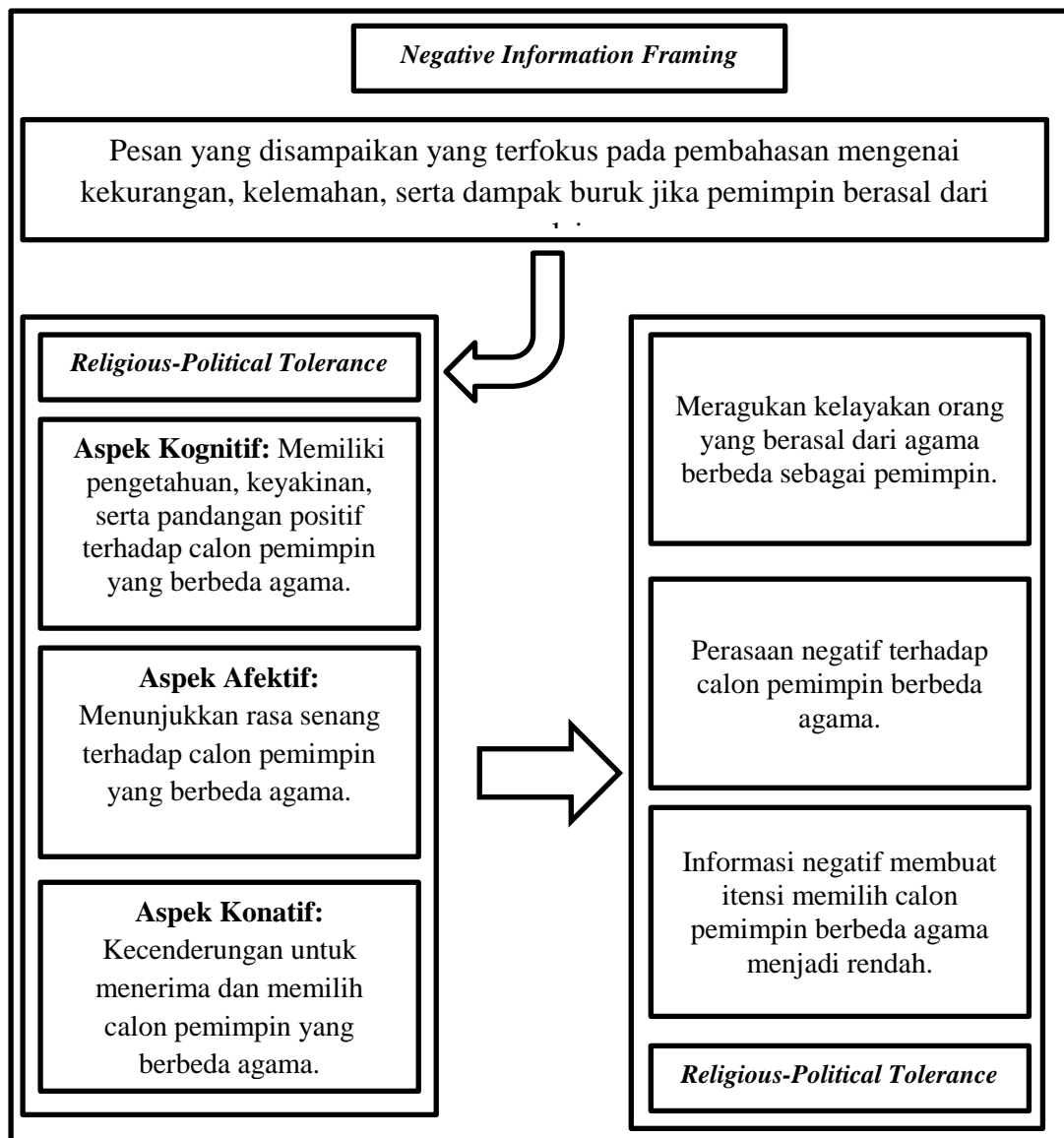
2.4 Pengaruh *Negative Information Framing* terhadap *Religious-Political Tolerance*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, *religious-political tolerance* meliputi penerimaan hak politik orang lain seperti penyampaian gagasan, tindakan-tindakan di ruang publik, demonstrasi, mengadakan pertemuan, dan hak-hak politik warga negara yang lain, kepada orang atau kelompok yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan dirinya. Pengertian tersebut mengimplikasikan bahwa penerimaan dan dukungan terhadap calon pemimpin yang berbeda agama merupakan manifestasi dari *religious-political tolerance*. Akan tetapi, perkembangan media yang pesat membuat elit politik turut memanfaatkannya sebagai sebuah strategi.

Kasus dan hasil penelitian terdahulu yang diangkat di latar belakang menunjukkan bahwa atribut agama seringkali digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik atau membangun citra politiknya sendiri. Salah satu cara umum yang digunakan adalah *framing*. Suatu informasi sengaja dipotret dari sudut pandang tertentu untuk mengarahkan pembaca/pemirsa pada persepsi tertentu tentang objek informasi. Kaitannya dengan agama dan politik yang dibahas dalam penelitian ini, suatu berita atau informasi lain sengaja dibentuk dengan *frame* tertentu untuk diarahkan pada kesimpulan bahwa memilih calon

pemimpin yang berbeda agama adalah salah. *Frame* tersebut menggunakan *negative information* yang membahas mengenai kekurangan, kelemahan, serta dampak buruk jika seorang pemimpin berasal dari agama yang berbeda.

Individu yang memiliki *religious-political tolerance* yang tinggi akan memiliki pengetahuan, keyakinan, serta pandangan yang positif terhadap calon pemimpin yang berbeda agama. Selain itu, perasaan positif yang diindikasikan dengan rasa senang atau suka juga akan memperkuat intensi individu untuk menerima dan memilih calon pemimpin yang berbeda agama. Akan tetapi, paparan *negative information framing* yang menyajikan pengetahuan dan fakta-fakta baru tentang kekurangan, kelemahan, serta dampak buruk adanya pemimpin yang berbeda agama memaksa individu untuk mengevaluasi kembali keyakinannya. *Negative information framing* yang seringkali menyulut emosi pembaca/pemirsa juga memunculkan kecenderungan bagi individu untuk terbawa dan mengubah keyakinannya tentang calon pemimpin yang berbeda agama. Pada akhirnya, paparan *negative information framing* akan membawa individu pada tingkat *religious-political tolerance* yang semakin rendah. Gambar 2.1 merupakan kesimpulan pengaruh *negative information framing* terhadap *religious-political tolerance*.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Pengaruh *Negative Information Framing* terhadap *Religious-Political Tolerance*.

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Djupe & Calfano (2013) menunjukkan bahwa efek dominan yang mempengaruhi *political tolerance* adalah ancaman, gaya komunikasi eksklusif, pengetahuan politik, dan pendidikan. Model analisis yang diajukan Djupe & Calfano memberi pemahaman bahwa ancaman memberi

pengaruh paling kuat terhadap *political tolerance*. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa pengetahuan politik dan pendidikan dapat meningkatkan level toleransi individu.

Nizah, d.k.k. (2015) membuat model untuk memahami *political tolerance*. Model tersebut menunjukkan bahwa seseorang akan lebih toleran jika hidup di negara dengan politik demokrasi. Penjelasan itu perimplikasi pada tiga hal. Pertama, *political tolerance* lebih tinggi di negara demokrasi yang stabil selama periode tertentu. Kedua, sistem federal menyediakan peluang yang besar untuk mendorong terjadinya kompromi politik. Hal ini berimplikasi pada tingginya level *political tolerance*. Terakhir, aktivitas demokrasi dapat mempertinggi level *political tolerance*. Partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dapat mempengaruhi keterbukaan pikiran seorang individu. Keterbukaan pikiran inilah yang pada nantinya akan meningkatkan *political tolerance*. Nizah (2017) meneliti tentang level *political tolerance* di Malaysia. Hasil penelitian mengungkap bahwa *political tolerance* berada pada kategori sedang-baik. Nizah mengungkapkan bahwa temuan menarik dalam penelitian tersebut adalah responden tidak mempertimbangkan identitas etnik sebagai sebuah halangan atau hambatan yang bisa menurunkan tingkat *political tolerance*.

Oskarsson & Widmalm (2014) mengkaji *political tolerance* ditinjau dari *the big five personality*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *openness to experience* dan *agreeableness* berimplikasi positif pada *political-tolerance*. Berbeda, *conscientiousness* identik dengan *political tolerance* yang rendah. *Extraversion* dan *neuroticism* pada penelitian tidak berimplikasi pada apa pun

(tidak signifikan). Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Freitag & Rapp (2015). Ia meneliti *political tolerance* ditinjau dari *the big five personality*. Hasil analisis data membawa pada kesimpulan bahwa individu *extraversion* dan *openness to experience* menunjukkan pengaruh signifikan pada kesediaan individu untuk memilih imigran sayap kanan dalam sebuah pemilu.

Zoghaib (2011) melakukan penelitian komparasi efek penggunaan TV dan internet terhadap *political tolerance* pada masyarakat Mesir. Hasil penelitian tersebut memberi pemahaman bahwa penggunaan TV dapat mendorong tingginya level *political tolerance*. Temuan penelitian juga memberi gambaran bahwa responden yang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi politik memiliki level *political tolerance* yang lebih tinggi, dibanding responden yang menggunakan internet untuk alasan lain. Taylor (2013) meneliti tentang efek media ekstrem pada perilaku politik pendengar atau penonton. Secara khusus, penelitian ini mengungkap efek media terhadap pengetahuan politik, kepercayaan pada pemerintah, efikasi, dan *political tolerance*. Berdasarkan hasil temuan penelitian, Taylor menjelaskan bahwa media dapat mempengaruhi *political tolerance* apabila *host* yang membawakan acara merepresentasikan ideologi tertentu.

Marcus (2005) menjelaskan bahwa seseorang dapat membuat pilihan politik apabila diberi kesempatan untuk merenung dan menilai fakta yang ada. Penilaian emosi yang terwujud dalam kecemasan akan mendorong seseorang untuk menentukan apakah seseorang akan melewatkan atau memperhatikan suatu informasi yang diberikan. Penjelasan ini membawa pemahaman bahwa kognisi

politik dapat menjadi pendukung proses emosional yang menyebabkan dampak dari informasi yang didapatkan. Hal ini juga mengimplikasikan bahwa proses pemahaman suatu informasi tidak hanya bergantung kepada proses kognitif, faktor emosional juga bisa menjadi penentu utama sikap yang diambil individu terkait suatu informasi.

Kobayashi & Ikeda (2009) mengungkapkan bahwa individu yang terpapar isu homogen dari internet, akan menganggap isu tersebut sebagai isu yang penting. Akan tetapi paparan isu homogen secara terus menerus tidak memberikan efek yang signifikan pada *political tolerance*.

Penelitian Lestari (2015) menunjukkan bahwa *negative framing* berpengaruh terhadap eskalasi komitmen dengan *locus of control* sebagai variabel pemoderasi. Meskipun bukan dalam ranah politik, penelitian ini memberi pemahaman bahwa paparan *negative framing* tentang suatu isu akan membuat bersikap negatif terhadap isu tersebut. Pada akhirnya, individu itu akan mengambil keputusan untuk menjauh atau berlawanan dengan objek *framing*. Muchlisin & Prihastuty (2016) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *attribute framing* serta *risky choice framing* terhadap efektivitas iklan. Kesimpulan penelitian tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang mengungkapkan efektivitas iklan yang menggunakan *negative framing*.

Penelitian Min (2004) menunjukkan bahwa efek kampanye negatif terhadap keterlibatan dalam pemilu dimoderasi oleh focus dari kampanye negatif tersebut. Ketika kampanye negatif tersebut focus pada cerita berita, pembaca hanya sedikit terpengaruh untuk tidak memilih objek kampanye negatif tersebut.

Akan tetapi ketika kampanye negatif tersebut fokus pada serangan personal terhadap calon tertentu, pembaca akan sangat terpengaruh untuk tidak memilih calon pemimpin tersebut.

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan juga penelitian terdahulu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa ada pengaruh *negative information framing* terhadap *religious-political tolerance*.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. *Religious-political tolerance* pada kelompok yang terpapar *negative information* berada kategori tinggi. Pada kelompok yang terpapar *negative information framing*, indikator mengizinkan berbicara di hadapan publik menjadi indikator yang paling ditoleransi dan indikator mengizinkan agar alat komunikasi tidak perlu disadap menjadi indikator yang paling rendah ditoleransi.
2. *Religious-political tolerance* pada kelompok yang tidak terpapar *negative information framing* berada pada kategori tinggi. Pada kelompok yang tidak terpapar *negative information framing*, indikator mengizinkan berbicara di hadapan publik dan mengizinkan memberikan materi di sekolah menjadi indikator yang paling ditoleransi dan indikator mengizinkan agar alat komunikasi tidak perlu disadap menjadi indikator yang paling rendah ditoleransi.
3. *Negative information framing* berpengaruh signifikan terhadap *religious-political tolerance*. *Religious-political tolerance* pada kelompok yang terpapar *negative information framing* lebih rendah dari pada kelompok yang tidak terpapar *negative information framing*.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Untuk Subjek Penelitian

1. Menjaga keobjektifan informasi yang didapat dengan cara tidak hanya membaca satu sumber saja sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang sudah di *framing* untuk keperluan tertentu.
2. Meningkatkan pengetahuan politik sehingga lebih komprehensif dalam memahami isu-isu politik di media.

5.2.2 Saran Untuk Penelitian Berikutnya

1. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa *negative information framing* mempengaruhi *religious-political tolerance* dengan melibatkan dimensi kognitif dan afektif. Penelitian selanjutnya perlu meneliti lebih spesifik *religious-political tolerance* ditinjau dari dua hal, yaitu: paparan *negative information framing* yang menyerang kognisi dan *negative information framing* yang menyerang afeksi.
2. Perlu adanya penelitian yang khusus dan mendalam tentang *religious-political tolerance* ditinjau dari tingkat pengetahuan politik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran pengetahuan politik dalam mengurangi efek *negative information framing*.
3. *Religious-political tolerance* dalam penelitian ini fokus pada kerelaan untuk mengizinkan orang yang berbeda agama menjadi pemimpin. Penting untuk dilakukan penelitian lanjutan mengenai dukungan politik terhadap orang yang berbeda agama ditinjau dari berbagai hal.

4. Eksperimen ini merupakan eksperimen yang melibatkan mekanisme pemrosesan informasi. Oleh karena itu selain pengetahuan politik terkait pemilu, *critical thinking* subjek penelitian merupakan variabel penting yang dapat dipertimbangkan sebagai kontrol penelitian. Akan tetapi, dilakukannya *random assignment* merupakan langkah yang lebih baik untuk mengontrol semua variabel luar yang dapat mempengaruhi perbedaan *religious-political tolerance* secara sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Azwar, S. (2010). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2011). *Metode Penelitian Edisi I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2017). *Penyusunan Skala Psikologi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- BBC. (2016, Desember 9). *BBC News*. Retrieved April 16, 2018, from BBC Indonesia: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38247580>
- BBC. (2018, Februari 11). Retrieved April 16, 2018, from BBC Indonesia: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43021264>
- BBC. (2018, Februari 23). *BBC*. Retrieved April 29, 2018, from BBC Indonesia: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43156642>
- Benson, I. O. (2016). Theory and Praxis of Religious Tolerance. *Ogirisi*, 293-318.
- Burchianti, F., & Zapata-Barrero, R. (2013). *Applying Tolerance Indicators: Assessing Tolerant and Intolerant Discourses and Practices in Political Life*. San Domenico di Fiesole: Accept Pluralism.
- CNN. (2018, April 08). *CNN*. Dipetik Mei 24, 2018, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180408060525-32-289191/ganjar-diterpa-isu-sara-puisi-sudirman-klaim-dukungan-wanita>
- Comstock, G., & Scharrer, E. (2005). *The Psychology of Media and Politics*. New York: Academic Press.
- Detik. (2017, Juni 27). *Detik News*. Dipetik Mei 27, 2018, dari Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-3542898/khotbah-singgung-kasus-ahok-kemenag-khatib-jangan-bahas-politik>

- Detik. (2018, April 26). *Detik News*. Dipetik Mei 27, 2018, dari Detik News: <https://news.detik.com/berita/3991219/amiien-rais-ceramah-di-balai-kota-anies-disebut-bermanuver-politik>
- Djupe, P. A., & Calfano, B. R. (2012). Religious Value Priming, Threat, and Political Tolerance. *Political Research Quarterly*, 1-13.
- Doorn, M. v. (2012). Tolerance. *sociopedia*, 1-14.
- Eisenstein, M. A. (2014). Political Tolerance, Psychological Security, and Religion: Disaggregating the Mediating Influence of Psychological Security. *Politics and Religion*, 7(Politics and Religions), 287-317.
- Ernst, N., Kuhne, R., & Wirth, W. (2017). Effects of Message Repetition and Negativity on Credibility Judgments and Political Attitudes. *International Journal of Communication*, 11, 3265-3285.
- Freitag, M., & Rapp, C. (2015). The Personal Foundations of Political Tolerance toward Immigrants. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 351-373.
- Fridkin, K. L., & Kenney, P. J. (2011). Variability in Citizens' Reactions to Different Types of Negative Campaigns. *American Journal of Political Science*, 55 (2), 307-325.
- Hall, J. P. (2017). Effect of Political Knowledge on Political Tolerance. *Journal of Political Science Education*, 1-19.
- Halperin, E., Pliskin, R., Saguy, T., Liberman, V., & Gross, J. J. (2014). Emotion Regulation and the Cultivation of Political Tolerance: Searching for a New Track for Intervention. *Journal of Conflict Resolution*, 58 (6), 1110-1138.
- Handoyo, E., Ngabiyanto, Susanti, M. H., Seftiono, C., & Arumsari, N. (2013). *Pemilu Untuk Pemula: Proses Pemilihan dan Pengawasan*. Jakarta: KPU dan Program Studi Ilmu Politik UNNES.
- Handoyo, E., Ngabiyanto, Susanti, M. H., Seftiono, C., & Arumsari, N. (2013). *Pemilu Untuk Pemula: Sistem dan Peserta Pemilihan Umum*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum dan Program Studi Ilmu Politik UNNES.
- Hazama, Y. (2010). Determinants of political Tolerance: A Literature Review. *Ide Discussion Paper*, 1-14.

- Hook, J. N., Farrell, J. E., Johnson, K. A., Tongeren, D. R., Davis, D. E., & Aten, J. D. (2015). Intellectual Humility and Religious Tolerance. *The Journal of Positive Psychology*, 1-7.
- Jayswal, M. M. (2017). Comparative Study on Negative Political Advertisements with Specific Focus on Attack and Rebuttal Television Campaigns from Indian Perspective. *Journal of Creative Communications*, 12(2), 134-149.
- Kobayashi, T., & Ikeda, K. (2009). Selective Exposure in Political Browsing. *Information, Communication & Society*, 629-953.
- Kompas. (2018, April 25). *6 Hal Politis yang Disampaikan Amien Rais di Balai Kota*. Dipetik Mei 27, 2018, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/25/07430421/6-hal-politis-yang-disampaikan-amien-rais-di-balai-kota>
- KPU. (2010). *Pemilu Untuk Pemula Modu 2*. Jakarta: KPU.
- KPU. (2010). *Pemilu Untuk Pemula Modu 3*. Jakarta: KPU.
- KPU. (2010). *Pemilu Untuk Pemula Modul 1*. Jakarta: KPU.
- Latipun. (2015). *Psikologi Eksperimen*. Malang: UMM Press.
- Lau, R. R., & Pomper, G. M. (2002). Effectiveness of Negative Campaigning in U.S. Senate Elections. *American Journal of Political Science*, 47-66.
- Lecheler, S., Keer, M., Schuck, A. R., & Hänggli, R. (2015). The Effects of Repetitive News Framing on Political Opinions over Time. *Communication Monographs*, 82, 339-358.
- Lestari, D. (2015). *Pengaruh Negative Framing dan Adverse Selection terhadap Eskalasi Komitmen dalam Pengambilan Keputusan Investasi dengan Locus of Control Sebagai Pemoderasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Liputan 6. (2017, Maret 13). *liputan6.com*. Retrieved April 24, 2018, from <https://www.liputan6.com/news/read/2882270/jenazah-nenek-hindun-ditelantarkan-warga-setelah-pilih-ahok>
- Malik, H. K. (2015). *Pedoman Pendidikan Memilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

- Marcus, G. E., Sullivan, J., Theiss-Morse, E., & Stevens, D. (2005). The Emotional Foundation of Political Cognition: The Impact of Extrinsic Anxiety on the Formation of Political Tolerance Judgments. *Political Psychology*, 949-963.
- Matthes, J. (2012). Framing Politics: An Integrative Approach. *American Behavioral Scientist*, 56(3), 247-259.
- McCreadie, M., & Rice, R. E. (1999). Trends in Analyzing Access to Information Part II: Unique and Integrating Conceptualizations. *Information Processing and Management*, 35, 77-99.
- Metro Tv. (n.d.). *metrotvnews.com*. Retrieved Mei 24, 2018, from <http://pilkada.metrotvnews.com/news-pilkada/MkMYg8mk-cerita-djarot-mendengar-khotbah-tolak-pemimpin-non-muslim>
- Min, Y. (2004). News Coverage of Negative Political Campaigns: An Experiment of Negative Campaign Effects on Turnout and Candidate Preference. *Press/Politics*, 95-111.
- Muchlisin, M. N., & Prihastuty, R. (2016). Pengaruh Framing Effect terhadap Efektivitas Iklan. *Intuisi*, 200-203.
- Mulyana, D. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Jogjakarta: LKiS.
- Mursyid, S. (2016). Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam. *Jurnal Aqlam "Jurnal of Islam and Plurality"*, 35-51.
- Myers, A., & Hansen, C. H. (2010). *Experimental Psychology*. California: Wadsworth.
- Nizah, M. A. (2017). The Political Tolerance and the Youth Perceived Participation in Malaysia.
- Nizah, M. A., Javan, J. A., Singh, S. S., & Samsu, K. H. (2015). Framing Ethic Tolerance, Political Tolerance, and Voting Behaviour. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 365-373.
- Oskarsson, S., & Widmalm, S. (2014). Personality and Political Tolerance: Evidence from India and Pakistan. *Political Studies*, 1-20.

- Pastarmadzhieva, D. (2015). Political Knowledge: Theoretical Formulations and Practical Implementation. *Trakia Journal of Sciences*, 16-21.
- Petersen, M., Slothuus, R., Stubager, R., & Togeby, L. (2010). Freedom for All? The Strength and Limits of Political Tolerance. *British Journal of Political Science*, 41, 581-597.
- Purwanto, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republika. (2017, Februari 15). *Republika*. Retrieved April 16, 2018, from republika.co.id: Masehi Advent
- Sarwono, S. W., & Meinarno, E. A. (2015). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Seniati, L., Yulianto, A., & Setiadi, B. S. (2011). *Psikologi Eksperimen*. Indeks: Jakarta.
- Shaver, J. H., Troughton, G., Sibley, C. G., & Bulbulia, J. A. (2016). Religion and the Unmaking of Prejudice. *PLoS ONE*, 11(3), 1-25.
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1992). Master Frames and Cycle of Protest.
- Stewart, E., Edgell, P., & Delehanty, J. (2017). The Politics of Religious Prejudice and Tolerance for Cultural Others. *The Sociological Quarterly*, 1-23.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sullivan, J. L., Marcus, G. E., Feldman, S., & Pierson, J. E. (1981). The Source of Political Tolerance. *The American Political Science Review*, 92-106.
- Sullivan, J., & Transue, J. (1999). The Psychological Underpinnings of Democracy: A Selective Review of Research on Political Tolerance, Interpersonal Trust, and Social Capital. *Annual Review Psychology*, 625-650.
- Taylor, J. B. (2013). The Effects of Extreme Media on Political Behavior Attitudes, and Media Selection. *Political Science Dissertations*, 1-23.
- tirto.id. (2018, April 11). *tirto.id*. Dipetik Mei 24, 2018, dari tirto.id: <https://tirto.id/batal-laporkan-ganjar-soal-puisi-fuib-punya-kepentingan-politik-cHC6>

- Utych, S. M. (2018). Negative Affective Language in Politics. *American Politics Research*, 46, 77-102.
- Vogt, W. P. (1994). What Is Tolerance and Why Should We Teach It? *Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies*, 16, 277-296.
- Widmalm, S. O. (2014). Personality and Political Tolerance: Evidence from India and Pakistan. *Political Studies*, 1-20.
- Zoghaib, S. Z. (2011). Television Exposure and Internet Use: Their Relationship to Political Tolerance in Egyptian Society. *SEARCH: The Journal of the South East Asia Research centre Relationship of Television Exposure & Internet Use to Pol*, 44-69.